

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN



TAHUN 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2007 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2007 ini disusun sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 218 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2007 juga sebagai implementasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2001, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2007, kepada segenap pejabat dan staf Badan Pengawas Kabupaten Lamongan saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah menjadi agenda Badan Pengawas Kabupaten Lamongan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam pelaksanaan tugas sehari – hari maupun dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007 dari Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih

diperlukan perbaikan – perbaikan di masa yang akan datang, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dikemudian hari.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Pengawas Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Maret 2008

**KEPALA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN LAMONGAN**
SUPARDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 164 744

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ,.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN ,	1
A. DATA UMUM ORGANISASI ,	1
- Personil,	4
- Sarana dan Prasarana,	5
- Pembiayaan,	5
B. ASPEK STRATEJIK ,	5
C. STRUKTUR ORGANISASI ,	6
BAB II : PERENCANAAN STRATEJIK ,	8
A. RENCANA STRATEJIK ,	8
- Visi,	9
- Misi,	9
- Tujuan,	11
- Sasaran,	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2007 ,	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ,	15
A. ANALISA CAPAIAN KINERJA ,	16
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ,	17
BAB IV : PENUTUP ,	19
A. KESIMPULAN ,	19
B. SARAN ,	19
Lampiran – Lampiran :	
1. Struktur Organisasi,	
2. Rencana Konejra Badan Pengawas Kab. Lamongan Tahun 2007 From RKT,	21
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Form PKK,	24
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran From PPS,	

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2007**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. DATA UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan

Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pengawas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok dan fungsi

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2001 pasal 3 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas pokok :

“ Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pengawasan.”

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan adalah :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan;
- 2) Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan;
- 3) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi Pemerintahan, Organisasi, Keuangan, Peralatan, Perlengkapan,

danBUMD, Pembangunan, Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat;

- 4) Pengujian dan Penilaian atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah;
- 5) Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
- 6) Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawas;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Pengawas;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dukungan Sumber Daya

1) Personil

Jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi :

(1) Jumlah Pegawai = 46 orang

(2) Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

- Golongan I = - orang
- Golongan II = 5 orang
- Golongan III = 28 orang
- Golongan IV = 7 orang
- Tenaga Kontrak = 6 orang

(3) Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 6 orang
- Eselon IV = 18 orang

(4) Jumlah Pegawai berdasarkan fungsi :

- Tenaga operasional = 24 orang
- Tenaga administrasi = 22 orang

(5) Jumlah pegawai berdasar tingkat pendidikan :

- Strata 3 (Doktor) = - orang
- Strata 2 (magister) = 8 orang
- Strata 1 (Sarjana) = 25 orang
- S M A = 11 orang
- S M P = 1 orang

(6) Jumlah pegawai berdasar disiplin ilmu yang dimiliki :

- Akuntansi = 5 orang
- Manajemen = 7 orang
- Ilmu Pemerintahan = - orang
- Administrasi Publik = 1 orang
- Teknik Arsitektur = 6 orang
- Hukum = 2 orang
- Sospol = 2 orang
- Administrasi Negara = 5 orang
- Ekonomi Perusahaan = - orang
- Magister Manajemen SDM = 4 orang
- Magister Manajemen Keuangan = - orang
- Magister Manajemen Pemasaran = 4 orang

(7) Jumlah pegawai yang telah mengikuti workshop :

- Audit Kinerja = 1 orang
- Audit Otonomi Daerah = 1 orang
- Audit Pendapatan Daerah = 1 orang
- Audit Keuangan Daerah = 1 orang
- Audit Investigasi = 1 orang

- Penyusunan dan Audit Laporan Keuangan Daerah = 1 orang
- Auditor Operasional = 3 orang
- Auditor Trampil Penuh = 3 orang

(8) Jumlah Pegawai yang telah mengikuti bintek :

- Bintek Pemeriksaan Kinerja = 21 orang
- Bintek Pemeriksaan Keuangan dan Barang = 23 orang
- Bintek Asistensi JFA dan Asistensi LAKIP = 5 orang
- Bintek Pendalaman terhadap Tipikor = 16 orang

(9) Jumlah Pegawai yang telah memiliki sertifikasi Auditor :

- Auditor Ahli = 1 orang
- Ketua Tim = - orang
- Trampil = 3 orang
- Pengendali Mutu = - orang
- Pengendali Teknis = - orang

2) Sarana dan Prasarana

- (1) Gedung tempat kerja = 428 m2
- (2) Musola = 45,5 m2
- (3) Ruang Pemeriksaan = 30 m2
- (4) Pendopo = 64 m2
- (5) Garasi/tempat parkir = 48 m2
- (6) Pertokoan Koperasi = 20 m2
- (7) Kendaraan roda empat = 5 unit
- (8) Kendaraan roda dua = 19 unit
- (9) Komputer :
 - Pentium 4 = 11 unit
 - Pentium III = 4 unit
 - Pentium II = 3 unit

- Laptop = 3 unit
- (10) Printer :
- Laser Printer = 2 unit
 - Ink Jet/Deskjet Printer = 9 unit
 - Dotmatrix = 4 unit
- (11) Media komunikasi :
- Telepon = 2 unit
 - Fax = 1 unit
 - Website = 1 unit

3) Pembiayaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas operasional pengawasan, Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam tahun 2007 memperoleh dana sebagai berikut :

(1) APBD Kabupaten

• Pendapatan	Rp.	0,-	
• Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.368.377.000,-	
• Belanja Langsung	Rp.	1.672.754.500,-	
Jumlah	Rp.	3.041.131.500,-	
(2) APBD I (rincian sesuai dengan perkegiatan)	Rp.		0,00
(3) APBN (sesuai dengan perkegiatan)	Rp.		0,00

B. ASPEK STRATEJIK ORGANISASI

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam TAP MPR RI nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 serta Keputusan Presiden RI Nomor 74 tahun 2001 merupakan lingkungan eksternal, yang tidak lepas dari lingkungan internal organisasi yang akan berpengaruh

terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Kabupaten Lamongan di bidang pengawasan.

Dalam era Otonomi Daerah, mandat untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pengawasan ada pada Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan sebagai Daerah Otonomi memiliki potensi wilayah cukup luas yaitu terdiri dari 27 kecamatan dan berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memungkinkan betapa kompleksnya manajemen di bidang Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah ini dimana semuanya itu sangat diperlukan adanya pengawasan mulai perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaannya.

Dengan terbentuknya unit-unit kerja Perangkat Daerah maupun unit-unit kerja penunjang Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran obyek Pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan cukup banyak yaitu terdiri dari 11 (sebelas) Dinas, 8 (delapan) Kantor, 7 (tujuh) Badan, 2 (dua) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah, 27 (duapuluh tujuh) Kecamatan, 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa dan 12 (dua belas) Kelurahan serta unit – unit kerja Pelaksana Teknis Dinas sehingga jangkauan pengawasan dan pemeriksaan begitu luas, disamping itu kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2007 dibidang umum Pemerintahan salah satu diantaranya adalah Peningkatan Kualitas Pengawasan Daerah.

C. STUKTUR ORGANISASI

Agar dapat menjalankan dan mengemban tugas pokok dan fungsi yang dibebankan, Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah memiliki struktur Organisasi sebagaimana terlampir yang terdiri dari unsur Pimpinan

yakni Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Sub. Bagian serta 5 (lima) Bidang, 15 (limabelas) Sub. Bidang yang terinci sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengawas
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
3. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan
 - Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa
 - Sub Bidang Pemerintahan Daerah
 - Sub Bidang Pertanahan
4. Bidang Keuangan, Peralatan, Perlengkapan, dan BUMD
 - Sub Bidang Keuangan
 - Sub Bidang Peralatan dan Perlengkapan
 - Sub Bidang BUMD
5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Sub Bidang Pertanian dan Industri
 - Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 - Sub Bidang Bangda, dan Proyek-proyek Program Bantuan Daerah
6. Bidang Kesejahteraan Sosial
 - Sub Bidang Pendidikan dan Agama
 - Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan
 - Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat
7. Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat
 - Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Anforjab
 - Sub Bidang Bina Aparatur
 - Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
8. Kelompok jabatan Fungsional (Struktur Organisasi terlampir)

BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi, Badan Pengawas Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategik 2006 – 2010 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / hambatan yang kemungkinan timbul. Rencana strategik Badan Pengawas Kabupaten Lamongan 2006 -2010 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam bab ini.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun kedua (2007) dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2007.

A. RENCANA STRATEJIK

1. Visi

Seiring dan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengawas Kabupaten Lamongan mempunyai visi :

**“ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
MELALUI PENGAWASAN YANG PROFESIONAL.”**

Penjelasan makna :

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel memberi arti bahwa aparatur pemreintahan adalah aparatur yang jujur dan professional serta menyadari tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sehingga mampu memberikan kepuasan kepada *stake holder*. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada unit – unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan masih dad an dijumpai temuan – temuan penyimpangan, oleh karena itu Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menentukan visinya yang merupakan keinginan

bagaimana pemerintah yang baik terwujud melalui pengawasan yang professional.

Tujuan visi tersebut adalah :

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
- Memberi arah dan focus strategi yang jelas;
- Memiliki orientasi terhadap masa depan.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Badan Pengawas Kabupaten Lamongan mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandate yang diterima, yaitu :

- Meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang professional didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- Terjaminnya kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap temuan penyimpangan;
- Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan, dan atau peniadaan penyimpangan.

Penjelasan masing – masing misi :

- Misi Kesatu

Meningkatkan kualitas SDM pengawas yang professional dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pengawasan terus ditingkatkan baik melalui pemeriksaan dan pengusutan.

- Misi Kedua

Terjadinya kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap temuan penyimpangan. Dari hasil pengawasan / pemeriksaan akan diperoleh temuan pemeriksaan dan dari temuan hasil pemeriksaan akan

diketahui penyebabnya yang berlanjut pada rekomendasi tindakan korektif yang perlu diambil sebagai langkah perbaikan selanjutnya.

- Misi Ketiga

Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan dan atau peniadaan penyimpangan. Dari hasil pengawasan yang profesional dilaksanakan secara berkesinambungan dan dari temuan pemeriksaan akan ada rekomendasi perbaikan yang sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan motivasi perbaikan pengurangan dan bahkan mungkin akan berdampak pada tiadanya penyimpangan sehingga *good governance* (pemerintahan yang baik) akan terwujud melalui pengawasan profesional tersebut.

3. Nilai – nilai

Nilai – nilai adalah parameter (ukuran) tentang kebenaran atau kebaikan yang diyakini dan ditetapkan dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan organisasi. Nilai juga sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana kita dalam setiap hasilnya melakukan tugas kita masing – masing untuk mencapai visi organisasi sebagaimana kita ingin bersikap terhadap satu sama lain didalam melaksanakan tugas, sebagaimana menghargai pihak – pihak yang diperiksa serta sejauhmana kita boleh melangkah. Ukuran nilai sangat berarti apalagi dijabarkan sepenuhnya dalam sikap atau perilaku sehari – hari, terutama harus ditunjukkan oleh pimpinan karena keteladanan bernilai sebagai ajakan.

Adapun nilai – nilai yang ditetapkan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam rangka melaksanakan misinya adalah :

• Disiplin Pribadi

Setiap individu yang ada Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sudah seharusnya menaati segala aturan yang ada dalam berperilaku sehari – harinya maupun dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- **Kecepatan**

Sebagai insan pengawas, harus serba cepat bersikap terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat yang terkait dengan tugas pengawasan dan cepat melaporkan hasil pengawasannya kepada pihak – pihak yang berwenang agar segera mengambil tindakan/langkah koreksi yang cepat dan tepat.

- **Kebenaran**

Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri - sendiri

- **Profesional**

Kemampuan lebih yang dimiliki dalam menjalankan tugas profesinya (mumpuni), seorang pengawas harus lebih mumpuni daripada yang diawasi.

- **Keunggulan**

Keyakinan untuk selalu menjadi yang terbaik

4. Tujuan

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai;
2. Peningkatan manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi system pengawasan kinerja yang professional dan terprogram;
3. Peningkatan tanggapan dari obyek pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dari temuan pemeriksa;

4. Peningkatan iklim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Sasaran

Sasaran dari organisasi yaitu merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi. Sasaran –sasaran Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ada 4 (empat) sasaran dengan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai;
2. Meningkatnya manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi system pengawasan kinerja yang professional dan terprogram;
3. Meningkatnya tanggapan dari obyek pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dari temuan pemeriksa;
4. Meningkatnya iklim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2007

Dalam tahun 2007 Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah menetapkan sasaran, indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capaian (target) sasaran. Selanjutnya berdasarkan sasaran yangtelah ditetapkan melaksanakan strategi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Tujuan pertama dengan sasaran

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai. Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yakni :

Kebijakan :

Pengawasan fungsi pengawasan internal untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan.

Program :

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, dengan kegiatan :

- 1). Pembinaan dan Peningkatan APIP;**
- 2). Koordinasi dan Monitoring Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;**

2. Tujuan kedua dengan sasaran :

Meningkatnya manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi system pengawasan kinerja yang professional dan terprogram. Sasaran ini disertai 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan

Kebijakan :

Peningkatan fungsi pengawasan internal untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan.

Program :

Merekomendasikan tindakan hokum terhadap Aparatur Pemerintah yang terbukti melanggar huku, dengan kegiatan meliputi :

- 1). PKPT;**
- 2). Pemeriksaan dan penanganan kasus – kasus pengaduan masyarakat.**

3. Tujuan ketiga dengan sasran :

Meningkatnya tanggapan dari obyek pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dari temuan pemeriksa. Sasaran ini disertai 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan.

Kebijakan :

Mengoptimalkan pendayagunaan dan dan system pengawasan secara professional terhadap instansi pemerintahan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan melalui pengawasn regular, insidentil maupun khusus.

Program :

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, dengan kegiatan meliputi :

- 1). Audit Akhir Tahun Anggaran;
- 2). Pemeriksaan Insidentil;
- 3). Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah.

4. Tujuan keempat dengan sasaran :

Meningkatnya iklim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran ini disertai 1(satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 1(satu) kegiatan.

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pemantauan / pengawasan terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada instansi pemerintah/perangkat daerah yang memberi pelayanan masyarakat.

Program :

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, dengan kegiatan meliputi :

1. Pemantau Pelayanan Publik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2007 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengawas Kabupaten Lamongan selama tahun 2007 kepada Bupati Lamongan atas mandat yang diberikan yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah untuk melaksanakan tugas desentralisasi.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran dan indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolak ukur kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan berdasarkan Rencana Strategik Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2006 – 2010 dengan menghitung indikator masuk (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Skala pengukuran kinerja tersebut dengan skala ordinal yaitu :

85 – 100	=	Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 < 85	=	Baik / Berhasil
55 < 70	=	Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55	=	Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Renstra, maka analisa capaian kinerja yang dipakai sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang berupa indikator *output* maupun *outcome*.

1. Sasaran pertama :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawasan melalui pendidikan/ pelatihan teknis dan meingkatnya sarana prasarana.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan indikator kinerja 100%.

2. Sasaran kedua :

Meningkatnya kinerja pengawasan terhadap obyek pemeriksaan (obrik) yang sasaran ini disertai 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan capaian indicator sasaran dan indicator kinerja 92,88 % .

3. Sasaran ketiga :

Meningkatnya tanggapan (tindak lanjut) dari obyek pemeriksaan (obrik) atas hasil pemeriksaan dari temuan pemeriksa. Sasaran ini disertai 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan indikator kinerja 92.25 %.

4. Sasaran keempat :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sasaran ini disertai 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan indikator kinerja 100 %.

Untuk pengukuran lebih lanjut secara terinci tentang pencapaian sasaran dapat dilihat pada formulir PPS terlampir.

**DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2007**

NO.	SASARAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1.	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).	√	--	--	--
2.	Pengawasan Insidentil.	√	--	--	--
3.	Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah.	√	--	--	--
4.	Pengawasan Khusus Audit Akhir Tahun Anggaran.	√	--	--	--
5.	Pemantauan Pelayanan Publik.	√	--	--	--
6.	Pemeriksaan dan Penanganan Kasus – Kasus Pengaduan Masyarakat.	√	--	--	--
7.	Pembinaan dan Peningkatan APIP.	√	--	--	--
8.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Inpres 5 Tahun 2004.	√	--	--	--

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan pada Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2007 sebesar Rp. 3.041.131.500,- yang digunakan untuk biaya administrasi umum dan untuk mewujudkan pencapaian 8 (delapan) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2007, sehingga jumlah total dana yang telah diambil sebesar Rp. 2.929.109.558,-. Sedangkan sisa dana yang belum terserap sebesar Rp. 112.021.942,- sebagaimana rincian berikut :

**DATA REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN 2007**

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I.	Belanja Tidak Langsung :			
	1. Belanja Pegawai	1.368.377.000,-	1.321.348.979,-	99
II.	Belanja Langsung :			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	218.804.500,-	218.804.500,-	100
	2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.	277.700.000,-	277.700.000,-	100
	3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	21.000.000,-	20.981.000,-	99
	4. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH.			
	a. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).	158.800.000,-	156.300.000,-	98
	b. Peningkatan Pengawasan Pemb. Daerah.	350.000.000,-	347.000.000,-	98
	c. Pengawasan Khusus Audit Akhir Tahun Anggaran.	50.000.000,-	49.600.000,-	98
	e. Pemantauan Pelayanan Publik.	225.000.000,-	222.000.000,-	98
	f. Pemeriksaan dan Penanganan Kasus – Kasus Pengaduan Masyarakat.	150.000.000,-	147.500.000,-	98
	g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Inpres 5 Tahun 2004.	75.000.000,-	68.700.000,-	91
	h. Pemeriksaan Insidentil.	50.000.000,-	49.650.000,-	99
	i. Latihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (APIP).	75.000.000,-	74.700.000,-	99
JUMLAH		3.041.131.500,-	2.929.109.558,-	98

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi sesuai dengan rencana kegiatan tahun kedua (2007) dan Rencana Stratejik 2006 – 2010 serta telah dapat memenuhi 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik 2006 – 2010 tersebut. Sebagai lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, fungsi utama yang diharapkan dari lembaga ini (Badan Pengawas Kabupaten Lamongan) adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan desentralisasi di bidang pengawasan.

C. SARAN

Agar selalu dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan dari Bupati Lamongan untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap pimpinan instansi / unit kerja yang kurang memperhatikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dari institusi pengawas fungsional termasuk Badan Pengawas Kabupaten Lamongan. Disamping itu agar sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tersebut dapat tercapai lebih baik dan lebih berkualitas, kiranya tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk dari pihak legislative.

Demikian laporan kinerja Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2007 untuk menjadi periksa.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN LAMONGAN**
SUPARDI, SH
Pemula Utama Muda
NIP. 010 164 744

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2007

- INSTANSI** : Badan Pengawas Kabupaten Lamongan
VISI : Terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui Pengawasan yang profesional
MISI :
 1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang profesional, yang didukung sarana dan prasarana yang memadai
 2. Mewujudkan motivasi perbaikan, pengurangan, dan atau penindakan penyimpangan
 3. Terjaminnya kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap temuan pemeriksaan.

Tujuan		Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Kel.
Uraian		Indikator		Kebijakan		Program
1	2	3	4	5	6	
<p>1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai.</p> <p>2. Peningkatan manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi sistem pengawasan kinerja yang profesional dan terprogram.</p> <p>3. Peningkatan tanggapan dari obyek pemeriksaan atas temuan hasil pemeriksaan.</p> <p>4. Peningkatan iklim pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan Peningkatan kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai.</p> <p>2. Meningkatnya manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi sistem pengawasan kinerja yang profesional dan terprogram.</p> <p>3. Meningkatnya tanggapan dari obyek pemeriksaan atas temuan hasil pemeriksaan.</p> <p>4. Meningkatnya iklim penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Pembinaan dan Peningkatan APIP</p> <p>2. Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.</p> <p>3. PKPT</p> <p>4. Pemeriksaan dan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat</p> <p>5. Pemeriksaan Insidentil</p> <p>6. Audit Akhir Tahun Anggaran</p> <p>7. Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah.</p> <p>8. Pemantauan Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap</p> <p>Merekommendasikan tindakan hukum kepada Aparatur Pemerintah yang terbukti melanggar hukum.</p> <p>Mengoptimalkan pendayagunaan dan system pengawasan secara profesional terhadap instansi pemerintah perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan melalui pengawasan regular, insidentil maupun khusus.</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pemantauan/pengawasan terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada instansi pemerintah/perangkat daerah yang memberi pelayanan masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>Merekommendasikan tindakan hukum terhadap Aparatur Pemerintah yang terbukti melanggar hukum</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.</p>	6	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2007
(Setelah PAK)**

INSTANSI **Badan Pengawas Kabupaten Lamongan**

FORMULIR RKT

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai.	- Jml peserta yang mengikuti Pembinaan dan Peningkatan APIP	40 orang	1. Meningkatkan - kualitas dan kuantitas SDM pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.	1. Pembinaan dan Peningkatan - APIP	1. Masukan : Dana/ SDM	Rupiah	75.000.000,00	
					2. Keluaran : - Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan APIP	Kali	1	
					3. Hasil : - Jumlah peserta yang telah mengikuti Pembinaan dan Peningkatan APIP.	Orang	40	
	- Jml Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan - Korupsi	6 Berkas		2. Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	1. Masukan : Dana/SDM	Rupiah	75.000.000,00	
					2. Keluaran : - Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.	Kali	6	
					3. Hasil : - Jumlah hasil pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.	Berkas	6	

2. Meningkatnya manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi system pengawasan kinerja yang profesional dan terprogram.	- Jml tindak lanjut PKPT Tahun 2007	39 Berkas	2. Merekomendasi tindakan hukum terhadap Aparatur Pemerintah yang terbukti melanggar hukum.	3. PKPT Thn. 2007	1. Masukan : -Dana/SDM	Rupiah	158.800.000,0
	- Prosentase Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan-masyarakat yang masuk.	80 %			2. Keluaran : - Jml. Pelaksanaan Tindak Lanjut PKPK Tahun 2006.	Kali	1
	- Jml Pemeriksaan Insidentil	74 LHP	3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.	5. Pemeriksaan Kasus-kasus pengaduan masyarakat	3. Hasil : - Jml. Hasil Tindakan lanjut PKPT Tahun 2009	Berkas	39
					1. Masukan : - Dana/SDM - Sasaran	Rupiah	150.000.000,00 100% *
3. Meningkatnya tanggapan dari obyek pemeriksaan atas temuan hasil pemeriksa.	- Jumlah obyek Audit Akhir Tahun Anggaran	27 Orbik		6. Pemeriksaan Insidentil	2. Keluaran : - Jml Kasus pengaduan dari Masy.	Kasus	50
					3. Hasil : - Jml. prosentase hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat.	%	100
				7. Audit Akhir Tahun Anggaran	1. Masukan : Dana	Rupiah	50.000.000,00
					2. Keluaran : - Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Insidentil	Kali	1 Tahun
					3. Hasil : - Jumlah Hasil Pemeriksaan	LHP.	74
					1. Masukan : Dana	Rupiah	50.000.000,00
					2. Keluaran : - Jumlah Pelaksanaan Audit Akhir Tahun Anggaran	Kali	1 Tahun
					3. Hasil : - Jumlah Hasil Audit Akhit Tahun Anggaran	Orbik	27

<p>4. Meningkatnya iklim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>- Jml Pengawasan Pembangunan Daerah.</p> <p>- Jml. Pemantauan Pelayanan Publik.</p>	<p>436 Kegiatan</p> <p>58 Unit Kerja</p>		<p>8. Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah</p> <p>9. Pemantauan - Pelayanan publik</p>	<p>1. Masukan : - Dana - Obrik</p> <p>2. Keluaran : - Jml. pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Daerah.</p> <p>3. Hasil : - Jumlah Hasil Pengawasan Pembangunan Daerah</p> <p>1. Masukan : Dana/SDM</p> <p>2. Keluaran : - Jml Pelaksanaan Pemantauan Pelayanan Publik</p> <p>3. Hasil : - Jml Hasil Pemantauan Pelayanan Publik yang</p>	<p>Rupiah</p> <p>Kali</p> <p>Kegiatan</p> <p>Rupiah</p> <p>Kali</p> <p>Unit Kerja</p>	<p>350.000.000,0</p> <p>1 tahun</p> <p>436</p> <p>225.000.000,0</p> <p>1 tahun</p> <p>58</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2007**

INSTANSI : Badan Pengawas Kabupaten Lamongan

Program	Kegiatan					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian/ Target	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian/ Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.	1.Pembinaan dan Peningkatan APIP.	1. Masukan : Dana/ SDM	Rupiah	75.000.000,00	74.700.000,-	99.06	
		2. Keluaran : - Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan APIP	Kali	1	1	100	
		3. Hasil : - Jumlah peserta yang telah mengikuti Pembinaan dan Peningkatan APIP.	Berkas	40	40	100	
	2.Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.	1. Masukan : Dana/SDM	Rupiah	75.000.000,00	68.700.000,-	91.06	
		2. Keluaran : - Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.	Kali	6	6	100	
		3. Hasil : - Jumlah hasil pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.	Berkas	6	6	100	

<p>2. Merekomendasikan tindakan hukum terhadap Aparatur Pemerintah yang terbukti melanggar hukum.</p>	<p>3. PKPT Tahun 2007.</p>	<p>1. Masukan : -Dana/SDM 2. Keluaran : - Jml. Pelaksanaan Tindak Lanjut PKPK Tahun 2007. 3. Hasil : - Jml.Hasil Tindaklanjut PKPT Tahun 2007.</p>	<p>Rupiah Kali Berkas</p>	<p>158.800.000,0 1 39</p>	<p>156.300.000,- 1 39</p>	<p>98.86 100 100</p>	
	<p>4.Pemeriksaan Kasus-kasus pengaduan masyarakat</p>	<p>1. Masukan : - Dana/SDM - Sasaran 2. Keluaran : - Jml Kasus pengaduan dari Masy. 3. Hasil : - Jml.prosentase hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat.</p>	<p>Rupiah Kasus %</p>	<p>150.000.000,- 100% * 31 80 %</p>	<p>147.500.000,- 100% * 50 80 %</p>	<p>98.33 100 80</p>	
<p>3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat</p>	<p>5. Pemeriksaan Insidentil</p>	<p>1. Masukan : Dana/SDM 2. Keluaran : - Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Insidentil 3. Hasil : - Jumlah Hasil Pemeriksaan</p>	<p>Rupiah Kali LHP</p>	<p>50.000.000,00 1 Tahun 74</p>	<p>49.650.000,- 1 Tahun 74</p>	<p>99.30 100 100</p>	
	<p>6.Audit Akhir Tahun Anggaran</p>	<p>1. Masukan : Dana 2. Keluaran : - Jumlah Pelaksanaan Audit Akhir Tahun Anggaran 3. Hasil : - Jumlah Hasil Audit Akhit Tahun Anggaran</p>	<p>Rupiah Kali Orbit</p>	<p>50.000.000,00 1 27</p>	<p>49.600.000,- 1 27</p>	<p>98.86 100 100</p>	

	7.Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	1. Masukan : - Dana - Obrik 2. Keluaran : - Jumlah pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Daerah. 3. Hasil : - Jumlah Hasil Pengawasan Pembangunan Daerah	Rupiah	350.000.000,0	347.000.000,-	98.86	
			Kali	1	1	100	
			Kegiatan	436	436	100	
	8. Pemantauan Pelayanan publik	1. Masukan : Dana/SDM 2. Keluaran : - Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Pelayanan Publik 3. Hasil : - Jumlah Hasil Pemantauan Pelayanan Publik yang	Rupiah	225.000.000,0	222.000.000,-	98.86	
			Kali	1 tahun	1 tahun	100	
			Unit Kerja	58	58	100	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2007**

INSTANSI : Badan Pengawas Kabupaten Lamongan

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	K e t.
1	2	3	4	5	6
<p>1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai.</p> <p>2. Meningkatnya manajemen - pemeriksaan dalam optimalisasi system pengawasan kinerja yang profesional dan terprogram.</p> <p>3. Meningkatnya tanggapan dari obyek pemeriksaan atas temuan hasil pemeriksa.</p> <p>4. Meningkatnya iklim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Pembinaan dan Peningkatan APIP</p> <p>2. Koordinasi dan Monitoring Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>40 orang</p> <p>27 Berkas</p>	<p>40 orang</p> <p>27 Berkas</p>	<p>100</p> <p>100</p>	
	<p>3. PKPT</p> <p>4. Pemeriksaan dan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat</p>	<p>39 Berkas</p> <p>80 %</p>	<p>39 Berkas</p> <p>80 %</p>	<p>100</p> <p>100</p>	
	<p>5. Pemeriksaan Insidentil</p> <p>6. Audit Akhir Tahun Anggaran</p> <p>7. Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah.</p>	<p>74 LHP</p> <p>27 Orbik</p> <p>436 Kegiatan</p>	<p>74 LHP</p> <p>27 Orbik</p> <p>436 Kegiatan</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	
	<p>8. Pemantauan Pelayanan Publik</p>	<p>58 Unit Kerja</p>	<p>58 Unit Kerja</p>	<p>100</p>	

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS
KABUPATEN LAMONGAN**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Tanggal : 18 Desember 2000
Nomor : 6 Tahun 2000

